

5. Alien Mus

3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra)

7 dari 7 orang Anggota

1. G. Budisatrio Djiwandono/Wakil ketua
2. Ir. KRT. H. Darori Wonodipuro, M.M.
3. Ir. Endor Hermono, MBA.
4. Ir. Sumail Abdullah
5. Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari Dess, M.Sc.
6. Ir. H. T. A. Khalid, M.M.
7. Dr. H. Azikin Solthan, M.Si.

4. Fraksi Partai Nasional Demokrat (F-Nasdem)

2 dari 5 orang Anggota

1. H. Sulaeman L. Hamzah
2. Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si.

5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB)

5 dari 6 orang Anggota

1. Daniel Johan/Wakil ketua
2. H. Muhtarom, S.Sos.
3. Luluk Nur Hamidah, M.Si, M.P.A.
4. Farida Hidayati, S.H, M.Kn.
5. Edward Tannur, S.H.

6. Fraksi Partai Demokrat (F-PD)

5 dari 5 orang Anggota

1. Dr. Suhardi Duka, M.M.
2. Drs. H. Guntur Sasono, M.Si.
3. Hj. Nur'Aeni, S.Sos, M.Si.
4. Muslim, S.Hi, M.M.
5. Bambang Purwanto, S.ST., M.H.

7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS)

4 dari 5 orang Anggota

1. Drh. H. Slamet
2. Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M.
3. Dr. Hermanto, S.E., M.M.
4. H. Johan Rosihan, S.T.

8. Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN)

2 dari 4 orang Anggota

1. Haerudin, S.Ag., M.H.
2. Slamet Ariyadi, S.Psi.

9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP)

1 dari 2 orang Anggota

1. Ema Umiyyatul Chusnah.

10. Sekretariat Jenderal

B. Pemerintah:

1. Edhy Prabowo, M.M., M.B.A. (Menteri Kelautan dan Perikanan);
2. Ir. R. Nilanto Perbowo, M.Sc. (Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan);
3. Muhammad Yusuf (Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan);
4. M. Zulficar Mochtar, S.T., M.Sc. (Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan);
5. Dr. Ir. Slamet Soebjakto, M.Si. (Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan);
6. Dr. Ir. Aryo Hanggono, DEA. (Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan);
7. Dr. Agus Suherman (Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan);
8. Ir. R. Nilanto Perbowo, M.Sc. (Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan);
9. Prof. Ir. Sjarief Widjaja, Ph.D., F.RINA. (Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan); dan
10. Dr. Ir. Rina, M.Si. (Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan).

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI,
Yang terhormat Menteri Kelautan dan Perikanan beserta jajarannya,
Serta hadirin yang kami hormati.

Mengawali rapat hari ini pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa berkat rahmat dan

hidayah-Nya kita dapat mengadakan Rapat Kerja ini dalam keadaan sehat *wal'afiat*.

Sesuai dengan jadwal acara rapat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020, telah diputuskan dalam Rapat Bamus pada tanggal 16 Desember 2019 dan keputusan Rapat Internal Komisi IV DPR RI pada tanggal 15 Januari 2020. Pada hari Selasa, 25 Februari 2020, Komisi IV DPR RI menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka membahas program kerja tahun anggaran 2020.

Bapak dan Ibu yang saya hormati.

Menurut laporan dari Sekretariat Komisi IV DPR RI, saat ini Rapat Kerja Komisi IV DPR RI telah dihadiri dan ditandatangani oleh 33 Anggota dari 54 Anggota, terdiri dari 9 Fraksi. Untuk itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 246 dan Pasal 251 Ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 12.00 WIB)

Rapat Kerja hari ini dimulai pada pukul 12.00 WIB dan akan diakhiri pada pukul 16.00 WIB. Apabila belum selesai dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 226 Ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI atau atas kesepakatan bersama. Dengan susunan acara sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua rapat;
2. Penjelasan Menteri Kelautan dan Perikanan terhadap agenda rapat;
3. Tanggapan Anggota Komisi IV DPR RI;
4. Jawaban Menteri Kelautan dan Perikanan;
5. Kesimpulan Rapat;
6. Penutup.

Apakah dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Rapat Kerja ini merupakan tindaklanjut dari Rapat Dengar Pendapat dengan Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 18 Februari dan tanggal 24 Februari 2020. Dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berdaya saing tinggi, maju dan unggul diperlukan regulasi, saya tegaskan lagi diperlukan regulasi yang berpihak penganggaran yang cukup serta daya juang dan kuat dan pantang menyerah dalam mencapai indikator kinerja utama yang telah ditetapkan serta dukungan supervisi akuntabel, tentunya untuk menanggapi semua ini diperlukan sistem yang sinergis dan selaras dalam rangka menghadapi hambatan dan tantangan yang ada.

Untuk itu, menjadi hal penting bagi Menteri Kelautan dan Perikanan dalam memimpin. Bapak Edhy Prabowo memimpin sebagai nahkoda Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk segera bangkit dari berbagai

masalah yang muncul seperti masalah keterpurukan pendanaan/ penganggaran yang mana cuma dapat enam koma sekian triliun. Kemudian masalah peraturan Menteri yang menimbulkan polemik dan masalah lainnya. Dengan harapan kedepan Menteri Kelautan dan Perikanan mampu membuat regulasi yang tepat serta menghadirkan program dan kegiatan prioritas unggulan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas optimal dan inklusif.

Sehubungan dengan hal di atas, pada Rapat Kerja hari ini Komisi IV DPR RI meminta penjelasan secara rinci kepada Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai perubahan komposisi postur anggaran di setiap eselon I terhadap rencana kerja, program dan kegiatan tahun 2020. Mengingat proses penganggaran ini merupakan siklus perencanaan yang harus diketahui bersama sebagai pedoman atau acuan dasar bagi pelaksanaan pembangunan atau dengan kata lain kalau bahasa Maduranya *action plan*. Yang bersifat implementatif dapat dilaksanakan. Jadi kalau programnya ada, duitnya ada, tidak dapat dilaksanakan berarti kinerja Kementerian KKP kurang baik. Di seluruh lapisan masyarakat Kelautan dan Perikanan.

Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Demikian pengantar yang kami sampaikan. Selanjutnya kami persilakan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menyampaikan penjelasan terkait hal tersebut di atas.

Kami persilakan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN (EDHY PRABOWO, M.M., M.B.A.):

Terima kasih Pimpinan.

Pimpinan, Bapak Ketua, para Wakil Ketua, dan Bapak, Ibu Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati,
Pada hadirin sekalian.

Pertama, kami mengucapkan banyak terima kasih telah diundang dalam Rapat Kerja dan selalu dibimbing dan dibina setiap saat dalam menjalankan tugas. Kami sudah menginjak bulan keempat Bapak Ketua, sesuai dengan arahan Pimpinan dan teman-teman Anggota Komisi IV DPR RI, kami ingin menyesuaikan pagu anggaran dalam rangka perkuatan sektor kelautan dan perikanan.

Sesuai dengan tugas kami yang diberikan oleh Bapak Presiden, yang pertama membangun komunikasi yang terbuka kepada nelayan, sudah kami lakukan. Kami membangun komunikasi semua lini Bapak Ketua, tidak hanya perorangan tetapi seluruh *stake holder* pemangku kepentingan kami sekarang buka sepenuhnya kantor Kelautan dan Perikanan ini menjadi tempat kita untuk menyampaikan semua keluhan dan mencari jalan keluar.

Tidak hanya itu, kami melibatkan seluruh *stake holder*, kepala dinas kabupaten kota dan provinsi seluruh Indonesia dan komunikasi kami *alhamdulillah* terjadi dua arah. Yang kemudian tugas kedua dari Bapak Presiden yang menjadi penekanan kepada kami adalah membangun sentra perikanan budidaya di mana sektor ini merupakan sektor yang sebenarnya kalau kita lihat di Indonesia baru terbudidayakan 10% saja Pak Ketua, itupun belum optimal. Maka itu, disini punya peluang bagi kita menghadapi perlambatan ekonomi dunia dan Indonesia sekarang. Ini adalah jalan yang mungkin jawaban untuk menjawab peningkatan ekonomi. Yang pertama, disini akan tercipta lapangan pekerjaan baru. Kedua, akan menambah devisa tentunya akan menambah kekuatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Selanjutnya kami juga tentang arahan Ketua tentang penyederhanaan peraturan. Tahap ini kami sedang dalam finalisasi Bapak Ketua, tentang Permen-Permen yang menjadi pertanyaan besar bagi pelaku usaha dan nelayan. *Insyah Allah* nanti akan kami pada waktunya kami sampaikan secara tertulis kepada Ketua, Permen-permen apa yang akan kami sempurnakan pelaksanaannya. Kami tinggal menunggu langkah, kami laporkan kepada Bapak Presiden sesuai dengan arahan beliau setiap Permen yang akan dikeluarkan kami akan dilaporkan kepada Bapak Presiden.

Yang ketiga Bapak Ketua, kami mohon dukungan oleh Bapak Ketua dan Komisi IV DPR RI tentang realokasi anggaran yang semula di program dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis lainnya KKP di Sekretariat Jenderal yang semula Rp515.623.761.000,00 itu menjadi Rp510.323.761.000,00 ada pengurangan Rp5,3 miliar. Yang kedua, program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas KPP dari Keirjenan tidak ada perubahan. Yang ketiga, program pengelolaan perikanan tangka ada pengurangan Rp45 miliar yang tadinya Rp702.462.450.000,00 menjadi Rp657.462.450.000,00

Kemudian program pengelolaan sumber daya perikanan budidaya, disini dari pengurangan-pengurangan itu kita masukkan keperikanan budidaya sebanyak Rp300 miliar totalnya sehingga terjadi peningkatan dari Rp739.572.614.000,00 menjadi Rp1.039.572.614.000,00 disini yang akan menjadi peningkatan rencananya akan diperuntukan untuk:

1. Revitalisasi tambak-tambak;
2. Pembangunan hatchery, bioflok;
3. Penambahan bantuan alat-alat ekskavator dimana ini menjadi banyak masukan dari daerah-daerah untuk segera dibantu.

Ini salah satu nanti secara detail akan kami sampaikan secara tertulis.

Yang ketiga, program penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan terjadi pengurangan di Ditjen PSD ini sebesar Rp45 miliar dari Rp366.017.696.000,00 menjadi Rp321.017.696.000,00 Kemudian program pengelolaan ruang laut menjadi pengurangan Rp38 miliar dari Rp507.850.023.000,00 menjadi Rp469.850.023.000,00 yang ketiga program pengembangan SDM dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan terjadi pengurangan Rp95 miliar dari Rp1.868.216.557.000,00 menjadi Rp1.773.216.557.000,00 Kemudian program karantina ikan, pengendalian

mutu dan keamanan hasil perikanan terjadi pengurangan dari Rp601.075.586.000,00 menjadi Rp586.075.586.000,00 terjadi pengurangan Rp15 miliar.

Pimpinan dan para Wakil Ketua, Bapak dan Ibu Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati.

Komitmen kami dalam membangun, kami tetap mohon selalu dukungan dan kami ingin selalu membangun komunikasi kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI dalam rangka penguatan ke daerah-daerah. Kami saya yakin Bapak dan Ibu semua, mempunyai basis-basis masyarakat yang selama ini sudah dibina dengan sangat baik. Kami ingin juga semua program-program ini kalau bisa ikut sama-sama masuk ke wilayah Bapak dan Ibu semua.

Dan kami berharap komunikasi itu tidak terjadi hanya di ruang rapat, kami juga membuka seluas-luasnya Bapak dan Ibu sekalian, untuk selalu senantiasa hadir keruangan kami, ke kantor kami, kalau ketemu Menteri mungkin susah karena menterinya dapat tugas kemana-mana, tapi juga ada para Dirjen. Dan kadang-kadang Dirjen juga banyak tugas keluar, mudah-mudahan kalau diterima Direktur jangan juga merasa tersinggung, tetapi intinya adalah komunikasi ini terjadi dan terus membuka.

Adapun dengan anggaran yang sekarang mungkin belum optimal, belum bisa memenuhi segala program kita sampai ke lapangan, kami juga mohon kesabaran Bapak dan Ibu sekalian, dalam rangka penyesuaian nanti kedepan. Kami yakin dan kami berjanji konsep penyesuaian ini memang butuh waktu. Sekarang ini kami membangun model dan bentuk dulu Bapak Ketua, seperti Bapak Ketua amati sejak dulu bentuk ini kalau sudah jadi tinggal menambahkan besar kecilnya itu tinggal tergantung bagaimana arahan Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI.

Demikian pengantar dari kami, laporan dari kami, kami berharap apa yang kami laporkan bisa mendapatkan persetujuan. Dan sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin hadir disini lebih lama dan ingin lama tinggal selalu bersama Bapak dan Ibu disini, tapi kami berharap tidak hanya disini kita ketemu.

Demikian dari kami.

*Wabillahi Taufiq Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Selanjutnya....

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN (EDHY PRABOWO, M.M., M.B.A.):

Mohon Pimpinan, satu hal yang kurang kami laporkan tentang perijinan kapal yang kemarin Bapak Ketua dan Bapak Ono pernah memberikan masukan sangat lama, susah, *alhamdulillah* kami sudah merilis satu jam. Satu jam itu tentunya belum optimal masih perlu perbaikan-perbaikan. Kami perlu masukan dari Bapak dan Ibu semua, kalau ada yang dapat masukan dari konstituen, “ah, itu cuma ngomong surat kapal kami tidak beres-beres”, tidak usah ditanggapi dengan ekstrim, tanya saja kapalnya minta datanya, minta nomor kapalnya, kirim kepada kami, bawa kepada kami dan *insya allah* itu tidak perlu lama-lama. Selama aturannya diikuti semua, kami pasti akan mudah mengeluarkan ijinnya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya eselon I.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN (EDHY PRABOWO, M.M., M.B.A.):

Untuk Satgas 115, kalau bisa tetap dijalankan karena ini adalah Perpres dan konsepnya memang kordinasi. Kami *alhamdulillah* selama ini di tengah laut tidak ada masalah dengan Angkatan Laut, Pol Airut, dengan Bakamla, dengan KPLP, dengan Perhubungan, dan Bea Cukai. Kami bahu membahu, jadi mohon ijin kalau bisa anggaran itu tetap ada dulu karena inipun anggaran yang kami rasa sangat minimal yang bisa kami laksanakan.

Terima kasih Bapak Ketua.

KETUA RAPAT:

Komisi IV DPR RI tidak bisa menghilangkan anggaran yang nomenkaltur sudah diusulkan oleh Kementerian, terkecuali ada temuan BPK atau ada rekomendasi BPK bahwa program tersebut bermasalah.

Selanjutnya Eselon I, silakan.

Anggota perlu penjelasan dari Eselon I? Sudah ya.

Pak Andi cepet banget kalau programnya sudah dapat.

Terima kasih atas penjelasan yang telah disampaikan, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak dan Ibu Anggota Komisi IV DPR RI untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapannya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 257 Peraturan Tata Tertib DPR RI bahwa setiap Anggota diberi waktu untuk bicara atau mengajukan pertanyaan paling lama 3 menit. Sampai saat ini di meja saya belum ada Anggota yang mengajukan pertanyaan.

Yang pertama Ibu Endang, jangan lebih dari 3 menit sesuai Tatib.

Silakan.

F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI, DESS., M.Sc.):

Baik, Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bapak Ketua, Bapak Menteri yang saya banggakan dan jajarannya para Eselon I.

Saya sudah membuat *paper policy* Pak, karena waktunya 3 menit. Jadi saya sampaikan saja secara tertulis, karena ini menyangkut kerja sama KKP dengan beberapa Kementerian yang saya anggap penting. Karena saya dulu merintis, membangun balai biogen dan juga balitkanwar yang ada di Sempur.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Kalau Bapak Menteri menyambangi Anggota itu wajar, karena Anggotanya sudah sepuh.

Selanjutnya Bapak Johan yang besok akan menyambut kita di NTB.

Silakan Bapak Johan.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Bapak Ketua.

Bapak Menteri dan jajaran yang saya hormati.

Yang pertama, ada arahan Presiden tentang memperbaiki komunikasi dengan nelayan. Agar Menteri fokus untuk melakukan komunikasi dengan nelayan, melakukan perlindungan dan pemberdayaan. Dan terkait dengan itu Bapak Menteri, mohon jelaskan kepada kami tentang bagaimana pola memperbaiki komunikasi dengan nelayan ini. Bagaimana tentang sertifikat hak atas tanah mereka, agar mereka mudah mendapatkan itu.

Bagaimana dengan kemudahan mereka untuk melaut, saya sudah sampaikan ketika rapat dengan Dirjen kemarin itu kesulitan para pelaut kita di pesisir itu untuk mendapatkan bahan bakar yang mereka harus antri di pom

bensin yang sama dengan kendaraan-kendaraan. Karenanya dibutuhkan ada pom bensin khusus untuk para nelayan di sekitar pesisir.

Yang berikutnya harga garam kita yang sangat rendah di masyarakat. Nah, pada saat yang sama target produksi garam nasional Bapak Menteri tahun 2020 ini hanya ditargetkan 3 juta ton. Sampai nanti 2024 targetnya 3,4 juta ton. Pada Menteri sebelumnya 2018, 2019 itu sudah terealisasi 2,85 juta ton. Jadi kurang sekali ini terlalu kurang kita membuat target. Saya meminta dan mengajak Bapak Menteri, ayo Pak kita kerja keras, kita kerja serius bagaimana kita memperbaiki kondisi garam nasional kita, agar kita tidak perlu lagi mengimpor garam dari luar.

Yang berikutnya, mari sama-sama kita menghitung tadi sempat kita bicara sebentar Bapak Menteri, tentang revitalisasi tambak rakyat. Di Sumbawa itu, itu sepanjang pesisir itu banyak sekali tambak-tambak rakyat itu yang terlantar. Coba kita hitung baik-baik ini, kalau misalnya ini bisa kita optimalkan secara baik banyak persoalan kesejahteraan rakyat yang bisa kita tuangkan.

KETUA RAPAT:

Kalau boleh secara spesifik supaya singkat, tambak apa Pak, sampaikan Pak.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Tambak udang, tambak garam, tambak ikan, segala macam itu Bapak Ketua.

Yang berikutnya tentang kurangnya daya saing perikanan kita Pak, kita tahun ini 43 triliun dibandingkan dengan Vietnam sudah 85 triliun per tahun. Padahal potensi kita itu, potensi Vietnam itu hanya sepertiga dibanding dengan kita. Mari kita lihat dari semua Dirjen itu yang paling rendah anggarannya itu adalah Ditjen Daya Saing Produk kita. Nah, kedepan mungkin sepakat dengan Pimpinan tadi itu, mari kita bersama-sama berpikir untuk meningkatkan potensi kelautan kita ini untuk peningkatan perekonomian rakyat kita tambah anggaran KKP tetapi memberikan perhatian juga kepada daya saing produk perikanan kita.

Terima kasih Pimpinan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Waktunya 2 menit lewat 40 detik.

Selanjutnya Bapak Azikin, Bapak jangan panjang-panjang Pak, yang penting nanti Bapak pulang bawa perahu Pak.

F-GERINDRA (Dr. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Pimpinan dan segenap Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati, Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan Bapak Edhy Prabowo beserta rombongan yang saya hormati.

Kemarin kita telah melaksanakan Rapat Kerja dengan Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan. Salah satu usulan yang kami sampaikan agar program-program yang dibuat oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing daerah. Sehingga kelemahan-kelemahan yang terjadi beberapa waktu yang lalu tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Sebagai contoh misalnya, kami sampaikan ada beberapa kapal di Makassar yang mangkrak dan sama sekali tidak digunakan karena tidak sesuai dengan karakteristik kelautan yang ada di Makassar. Panjang kapal terlalu pendek, tingginya juga terlalu tinggi.

Yang kedua, agar rentan kendali sistem kontrol yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan kami usulkan untuk memperluas struktur-struktur Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ada di daerah khususnya daerah provinsi, kabupaten dan kota. Sehingga rentan kendali pengawasan antara Kementerian dan daerah itu bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan.

Sehungan dengan hal tersebut tentu walaupun kita kenal dengan *money follow program* atau *money follow function* tapi perlu dengan adanya pengembangan struktur-struktur di daerah membutuhkan tambahan biaya. Oleh sebab itu, apa yang disampaikan oleh eselon I kemarin kami mendukung untuk tambahan biaya.

Yang kedua, juga kami sampaikan kepada Bapak bahwa opini BPK yang disclaimer kedepan tidak terulang lagi. Inilah mungkin yang perlu kami sampaikan kepada Bapak, akhirnya perkenankan kami menyampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Selanjutnya Pak Ichsan Firdaus.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Terima kasih Ketua.

Agak galak Ketua hari ini.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bapak Menteri, Bapak Eselon I yang kami hormati, para pejabat di KKP, teman-teman Komisi IV DPR RI.

Bapak Menteri, pertama saya terkait dengan penenggelaman kapal Pak Menteri. Kita senang kalau kemudian Kementerian KKP melakukan penenggelaman kapal, tetapi jangan hanya sekedar shock terapi, saya mengerti bahwa penenggelaman kapal ini untuk shock terapi. Tapi ada beberapa kapal sitaan sebaiknya menurut saya Bapak Menteri, kemarin saya sudah bertanya kepada Bapak Irjen terkait dengan keberadaan kapal sitaan hasil pengadilan. Saya usulkan Bapak Menteri, selain kemudian ditenggelamkan sebagai upaya shock terapi tetapi juga perlu dipikirkan bagaimana agar kapal sitaan itu juga digunakan untuk kepentingan para nelayan maupun para usaha yang lainnya.

Saya mau tanya sebenarnya Bapak Menteri, berapa jumlah kapal sitaan. Kemarin Bapak Irjen sudah menyampaikan tetapi sebaiknya penggunaannya juga digunakan untuk kepentingan bukan hanya untuk rumah sakit terapung sebenarnya Bapak Menteri, akan tetapi untuk penggunaan-penggunaan yang lebih produktif untuk sektor perikanan.

Yang kedua Bapak Menteri, terkait dengan penguatan dana alokasi khusus untuk daerah. Mungkin tahun ini tidak karena sudah dibentuk, tapi harus dipikirkan tahun 2021 bagaimana agar, tadi Bapak Azikin sudah menyampaikan rentang kendali daerah ini juga perlu diperkuat Pak Menteri. Saya lihat memang dana alokasi khusus untuk daerah ini semakin lama Kementerian Kelautan semakin kecil. Ini perlu kita kuatkan tahun 2021.

Yang ketiga, terkait dengan sekali lagi saya hanya bicara tentang Satgas 115. Satgas 115 ini kita hanya mengingatkan kepada Bapak Menteri jangan sampai tumpang tindih dengan Direktorat Jenderal Pengawasan Kelautan dan Perikanan. Tumpang tindih ini khawatirnya nanti ada persoalan penggunaan double anggaran atau kemudian ada pelebaran atau tumpang tindih kewenangan. Saya hanya mengingatkan itu Pak Menteri, regulasi juga perlu dirubah terkait dengan Satgas 115. Dan juga bagaimana memperkuat Ditjen Pengawasan.

Yang keempat terakhir Pak Ketua, kita belajar dari regulasi tentang pelarangan cantrang. Tiga kali regulasi pelarangan cantrang ini ditunda, bagaimana sebuah kebijakan Bapak Menteri, ditunda sampai tiga kali. Sampai sekarang pun regulasi itu statusnya masih penundaan pasca demo nelayan besar-besaran tahun 2018. Kita belajar dari regulasi itu, saya berharap Bapak Menteri regulasi apapun yang nanti....

KETUA RAPAT:

Cukup Bapak Ichsan sudah 3 menit.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Setengah menit lagi boleh?

Regulasi itu jangan sampai Pak Menteri, jangan sampai kemudian ada kewenangan yang istilahnya wibawa regulasi itu kemudian hancur gara-gara ditunda sampai tiga kali. Belum pernah terjadi kejadian regulasi sampai ditunda tiga kali. Nah, regulasi-regulasi seperti ini hasil revisi nanti Bapak Menteri yang lakukan terkait dengan dunia sektor kelautan dan perikanan mohon membuka komunikasi dengan para *stake holder*. Dan itu sudah dilakukan oleh Bapak Menteri tetapi jangan sampai ada penundaan sampai tiga kali seperti kemarin. Cukup Bang Toyib Pak Menteri, tiga kali.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Pak Ichsan, tadi masalah DAK tadi saya agak kurang setuju. Kenapa saya katakan tidak setuju? Kemarin kami di Batam, di Kepri, APBD-nya Rp3,7 triliun tetapi anggaran untuk Dinas Kelautan dan Perikanan hanya Rp40 miliar sampai Rp50 miliar. Karena mereka semua berharap dari pusat, karena dianggapnya juga mungkin 40-50 cukup. Kemarin saya katakan mungkin Kepala Daerahnya gagal paham. Kenapa gagal paham? Dari plat nomor kendaraannya pun sudah terlihat, BP (Banyak Pulau), tetapi dianggarkan 40-50 miliar per tahun APBD-nya, provinsi ya Pak Ichsan. Jadi kalau kita dorong terlalu besar juga tidak ada gunanya karena mereka berharap besar dari pusat sementara yang mereka punya digunakan untuk yang lain. Tidak perlu ditanggapi Bapak Ichsan.

Yang kedua, masalah regulasi sampai tiga kali dirubah, ya kalau sampai dirubah sama Menteri yang ini sampai tiga kali, namanya dia juga gagal paham. Karena beliau 5 tahun disini pasti tidak akan terjadi.

Selanjutnya Dapil Aceh Bapak Salim Fakhry.

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Terima kasih Ketua.

Bapak Ketua dan Pimpinan yang kami hormati,
Bapak Menteri dan jajarannya.

Inilah enaknyanya jadi Ketua, kalau Ketua boleh lewat 3 menit karena dia punya hak. Ijin Pak Ketua, saya Bapak Ketua merasa bangga hari ini. Hari ini

lengkap Pimpinan hadir, tidak pernah Rapat Kerja seperti ini Bapak Menteri, ini pertanda hubungan kami sama Bapak Edhy ini memang tidak bisa dipisahkan lagi. Masuk barang itu Bapak Ketua.

Saya kira apa yang dipaparkan Bapak Menteri, komunikasi sangat perlu. Dulu terus terang kita tidak menyalahkan kepemimpinan yang lalu, komunikasi terputus dengan Komisi IV DPR RI, hari ini saya kira sudah lebih baik. Saya hanya normative saja Bapak Menteri, saya tidak apa-apa, bukan memuji kepada Bapak Menteri, Cuma sesuai dengan arahan Pimpinan, tanggungjawab kita Komisi IV DPR RI bagaimana menaikkan anggaran Menteri KKP ini dari enak koma sekian minimal menjadi 13 untuk tahun yang akan datang. Ini tanggungjawab Banggar Pak Menteri, saya kira walaupun dari partai Pak Darori tidak ada Banggarya, kami mewakili nanti Bapak Menteri.

Bapak Menteri yang terhormat.

Apa yang disampaikan Bapak Ketua, apa yang disampaikan ini sudah nyambung Pak Menteri. Bapak Menteri membuka kantor walaupun tidak ada Menteri, Direktur minimal akan melademi Anggota Komisi IV DPR RI. Saya kira ini saja saya Ketua, saya tidak banyak-banyak apa Bapak Ketua. Cuma ada satu Pak Ketua, Bapak Ketua saya juga bisa dari bawah Bapak Ketua. Cuma tidak seberani marah Bapak Ketua, saya juga ingin foto sama Bapak Menteri, ini ada saya bawa proposal dari Bupati Gayo Luwes Pak Ketua. Saya sampaikan langsung kalau Bapak Ketua ijin.

KETUA RAPAT:

Ya, sampaikan langsung.

Kalau mau minta kok pakai muter-muter.

Kalau yang banyak dialami, *insya allah* semua ngasih program kepada Bapak Salim Fakhry.

Selanjutnya Bapak Sutrisno, silakan Fraksi PDI Perjuangan.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Bapak Menteri dan jajaran.

Yang pertama, kami ucapkan terima kasih Bapak telah mampu mempercepat perijinan. Ini memberikan jawaban terhadap nelayan yang sikaptis pada saat saya temui Bapak Menteri. Begitu ketemu jawabannya apa? musuh saya Pemerintah, NKRI sudah bubar karena sulitnya mendapatkan perijinan. Nah, setelah perijinan ini dipersingkat tentunya yang kedua adalah kenapa mereka mengatakan NKRI sudah bubar? Karena

merasa terganggu sepanjang perjalanan melaut itu. Jadi seolah-olah tidak punya NKRI.

Kemudian yang kedua, kami juga sangat memahami wilayah NKRI ini sangat luas, lebih luas daripada wilayah daratan. Anggarannya hanya 30% dari anggaran Menteri Pertanian. Oleh karena itu, kami juga sangat mendorong rekan-rekan di Banggar bahwa sudah seharusnya memang Kementerian Kelautan dan Perikanan ini ditingkatkan anggarannya.

Yang ketiga Bapak Menteri, ini pesan dari petani garam rakyat ini. Dari neraca pangan memang produksi garam rakyat itu Cuma separuh dari kebutuhan. Artinya Pak, impor tidak bisa dihindari. Sungguh pun demikian untuk melindungi kepentingan petani garam rakyat mohon Bapak Menteri untuk bicara dengan Menteri-menteri yang lainnya agar garam rakyat ini diutamakan untuk diakses dulu, dimanfaatkan dulu oleh pabrikan sehingga tidak terkalahkan oleh dengan masuknya garam impor itu tidak mengalahkan harganya garam rakyat, karena sebelum tahun 2018 justru harga garam bagus. Jadi ini semuanya kami juga terletak bagaimana kebijakan Bapak Menteri untuk bisa memperjuangkan hak-hak petani garam rakyat ini.

Kemudian yang terakhir Pak Menteri, untuk sekian kalinya saya menyampaikan dampak daripada pembangunan Patimban. Nelayan Patimban ini tersingkirkan aktifitas usahanya Pak, mereka tidak bisa melaut kemudian saluran penambatan juga terjadi pendangkalan. Mohon untuk ditinjau Pak, untuk bisa diselesaikan. Kemana mereka harus berusaha ada sebagian ingin tetap melaut, ada sebagian minta dibantu untuk dialirkan ke tempat lainnya untuk bisa bekerja.

Demikian, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Cukup, Bapak Sutrisno.

Jadi tidak perlu Bapak Menteri yang meninjau, mungkin kalau Dirjen Tangkap minggu depan ada waktu pas Reses diajak sama Bapak Sutrisno untuk meninjau lokasinya. Kalau Bapak Menteri inikan orang paling sibuk sedunia, kita harus paham.

Selanjutnya Bapak Suhardi Duka, silakan Pak.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,
Yang saya hormati Bapak Menteri bersama dengan seluruh jajarannya.

Kalau kita melihat capaian kinerja, indikator kinerja KKP tahun 2018, 2019 cukup menggembirakan hati kita, karena tingkat pertumbuhan PDB

melampaui pertumbuhan nasional, yaitu 5,8%. Dan estimasi untuk 2020 sebesar 7,9%. Menurut saya ini adalah suatu prestasi dan juga merupakan optimisme, estimasi yang sangat optimis mencapai 7,9%. Hanya saja yang ingin saya pertanyakan sumber datanya ini dari mana, karena saya bukan cantumkan sumber datanya. Begitu pun pertumbuhan terhadap perikanan tangkap dan budidaya, tangkap ini 7% bahkan budidaya sampai dengan 16%. Ini perlu kita diyakinkan Pak Menteri, apa benar pertumbuhannya seperti ini, datanya sumbernya dari mana.

Yang kedua, tentang kebijakan aturan perikanan. Sebaiknya diarahkan untuk kepentingan nelayan, bukan untuk kepentingan pengusaha atau kepentingan lainnya. Rakyat butuh perlindungan dan dukungan bantuan Pemerintah. Seperti petani rumput laut, rumput, kapal, alat tangkap, nelayan dan lain sebagainya, ini yang dibutuhkan oleh rakyat kita.

Yang ketiga adalah ekspor penting didorong untuk mendapatkan devisa. Oleh karena itu, aturannya supaya bisa mendorong ekspor juga bisa untuk mengangkat harga komoditas dalam negeri, bukan kebijakan impor yang dipermudah. Karena kalau kebijakan impor yang dipermudah saya kira tidak ada manfaatnya bagi nelayan kita. Kita lihat direstoran yang banyak itu disajikan salmon, karena bukan kerapu dan lain sebagainya, gurame. Saya kira ini yang sedikit kebijakan-kebijakan dalam negeri kita yang terlalu membuka impornya sehingga melemahkan juga persaingan dalam petani atau nelayan kita.

Terakhir kita sepakat di Komisi IV DPR RI bersama dengan Kementerian KKP untuk kita berjuang bersama-sama menaikkan anggaran pada tahun 2021. Saya kira ini adalah untuk kepentingan rakyat bukan untuk kepentingan komisi atau kepentingan Bapak Menteri, karena nelayan dan laut adalah bagian dari upaya kita untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia.

Demikian, terima kasih.

*Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamit Tharieq,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam.

Selanjutnya Bapak Andi Akmal.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):

Terima kasih Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI, Bapak Menteri beserta jajaran, Bapak dan Ibu sekalian.

Jadi Bapak Ketua, walaupun PKS ini opisisi tapi tetap kritis dan konstruktif memberikan masukan kepada Pemerintah. Jadi pertama, kita berharap saya tidak bertanya dan juga tidak meminta karena kemarin kita sudah rapat dengan Eselon I. Yang pertama Bapak Menteri, saya kira kita berharap bahwa di bawah Bapak Edhy ini Menteri KKP kedepannya menjadi lebih baik. Dalam arti kata bisa mensejahterakan nelayan dan bisa mengentaskan kemiskinan.

Oleh karena itu, Bapak Menteri sepakat dengan Bapak Salim Fakhry tadi bahwa peningkatan anggaran ini sesuatu yang harus Pak. Oleh karena itu, saya yakin Bapak Edhy ini bisa meyakinkan Bapak Jokowi, Bappenas dan Menteri Keuangan. Karena ini dulu memang harusnya karena dari awal penyusunan anggaran itu berasal dari Pemerintah. Saya kira kalau di Banggar ini hanya mengawal bagaimana supaya anggaran KKP itu tidak dikurangi atau mungkin bisa mendapatkan tambahan. Jadi saya ini pertama tugas Bapak meyakinkan Bapak Presiden, sehingga kedepannya KKP betul-betul bisa bermanfaat bagi masyarakat kita.

Yang kedua Pak Menteri, mengenai masalah kinerja. Saya melihat bahwa Humas Bapak Menteri kedepannya harus diperkuat Pak. Selama beberapa bulan kita melihat ada pendapat saya kira biasa, tapi saya ingin kinerja Bapak ini, kerja Bapak Menteri ini betul-betul publik bisa melihat dan bisa mendengar apa yang dikerjakan. Jangan sampai Bapak Menteri ini sudah bekerja 24 jam tapi publik tidak tahu. Inikan kita ingin kemarin yang sudah bagus, Menteri yang sebelumnya dilanjutkan lagi kerja-kerja Humasnya Pak. Apalagi kalau kerjanya sudah bagus, ya Humasnya juga bagus, saya kira ini sesuatu yang sangat bagus.

KETUA RAPAT:

Jadi yang terakhir hanya Humasnya saja yang bagus yang lain tidak.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):

Bukan, maksudnya kerja yang sudah bagus tadi Bapak Ketua, Humasnya diperkuat. Bapak Ketua ini suka menyela juga pembicaraan kita ini. Itu yang kedua.

Yang ketiga, yang terakhir Bapak Menteri, seperti di pertanian ada subsidi pupuk. Nah, ini sebenarnya juga sudah menjadi aspirasi luas Pak, terutama pembudidaya di empang. Kalau di kami di Sulsel itu sekarang inikan mereka dapat subsidi pupuk 1 sak per hektar sangat kurang Pak, kebutuhannya 8 sak per hektar. Saya kira saya maunya nanti Bapak Menteri kedepannya bicara dengan Menteri Keuangan, Bappenas, karena ini hubungannya dengan subsidi pupuk bagaimana supaya masyarakat nelayan juga mendapatkan subsidi pupuk sama dengan Petani kita secara legal. Karena selama ini mereka sembunyi-sembunyi beli subsidi pupuk dari petani, karena mereka butuh pupuk untuk budidaya perikananannya.

Saya kira itu saja Bapak Ketua, 3 hal yang saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi catatan bagi Bapak Menteri, karena saya kira kita berikan waktu setahun Bapak Menteri bekerja kemudian kita nanti akan memberikan masukan-masukan ataupun kritikan-kritikan untuk membangun.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih atas penjelasannya Humasnya Pak Andi.

Selanjutnya Bapak Haerudin.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI yang terhormat,
Bapak Menteri KKP beserta seluruh para pejabat yang hadir pada siang hari ini yang saya hormati.

Tidak banyak Pak Sudin yang ingin kami sampaikan, mengingatkan bahwa kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan jangan biarkan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) yang lain mangkrak, yang kalau dibangun kita harus kembali dari nol. Sayang biaya sudah pada keluar, lebih baik diinventarisir seluruh Indonesia mana-mana yang harus diselesaikan secara bertahap, sekaligus tidak mungkin tetapi secara bertahap pasti insya allah selesai. Sayang pelabuhan-pelabuhan kita, nelayan terganggu, tidak bisa maksimalkan pelabuhannya dan terganggu mereka bisa turun kelaut kepada pendaratannya tidak punya.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya Ibu Ema.

F-PPP (EMA UMIYYATUL CHUSNAH):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bapak Menteri beserta jajaran,
Pimpinan Komisi IV DPR RI yang kami hormati dan seluruh Anggota.

Tidak banyak yang saya sampaikan Pak, satu hal saja terkait unek-unek ini Pak Menteri. Untuk terutama tentang program pengelolaan perikanan

budidaya, ini calon penerima Bansos yang dari program pengelolaan perikanan budidaya ini salah satu persyaratannya harus mempunyai badan hukum. Dan ini apabila bisa lebih disederhanakan lagi kalau toh punya kita siapkan itu, kalau toh tidak punya ada kebijakan mungkin disederhanakan lagi melalui rekomendasi atau mengetahui dinas terkait atau bagaimana, itu yang diminta oleh calon penerima Bansos, karena keluhannya untuk mengurus badan hukum saja ini membutuhkan waktu yang panjang dan mahal.

Terima kasih Bapak Menteri, barangkali bisa lebih disederhanakan, dan saya akhiri.

*Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamit Tharieq,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Terima kasih Ibu Ema.

Selanjutnya Mbak Luluk.

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Terima kasih Bapak Pimpinan juga Bapak Menteri, Anggota.

Yang pertama saya mendukung apa yang disampaikan oleh Ibu Ema, karena keluhan ini tampaknya rata Pak Menteri. Jadi ini juga sekaligus evaluasi kenapa anggaran KKP itu sebagian besarnya ada yang tidak terserap khususnya yang Bansos, karena prosedur mekanismenya itu rumit. Jadi kalau mau ngasih bantuan rakyat kecil disederhanakan, itu lebih manfaat dan lebih berkah. Jadi saya dukung ya Ibu Ema.

Terus yang kedua, karena ini bicara tentang kebijakan mumpung Bapak Menteri ini ada. Ada satu hal yang mengganjal di pikiran saya ini Pak Menteri, yang terkait dengan kebijakan Kementerian ini dari tahun ke tahun maksud saya, terkait dengan pengelolaan perikanan laut selatan Jawa. Jadi selama ini kebijakan itu lebih berorientasi kepada laut Jawa dan terutama yang utara dan seterusnya. Sementara disana kita tahu itu bahkan itu sudah *over fishing* dan lain sebagainya. Jadi segenap bantuan infrastruktur dan juga bantuan alat tangkap apapun itu memang lebih banyak disana. Sehingga kita tahu sekali kondisi perikanan di laut selatan Jawa padahal ini berhadapan langsung dengan samudera Hindia itu tidak diperhatikan.

Mohon dibantu dukungan riset, contohnya ya seperti apa sih potensi ekonomi di laut Selatan Jawa, itu kategorinya termasuk di Wonogiri, Cilacap, dan seterusnya. Kalau misalnya ini dikelola dengan benar dan kemudian ada intervensi dari Pemerintah secara serius apa sebenarnya yang bisa kita dapatkan. Karena yang satu inikan sudah berlebih sementara yang ini belum, padahal disitu juga ada ZEE, kita hanya menemui masalah ketika tiba-tiba di ZEE ini situasi yang berhadapan langsung dengan kekuatan asing, entah itu kapal-kapal besar dan seterusnya. Nah, kenapa ini tidak jadi pembelanjaran,

satu contoh misalnya kemarin di Natuna tetapi saya bicara tentang laut selatan juga ya. Ini tidak menjadi pembelanjaran bahwa kedepan mungkin kita waktunya untuk melirik selatan Jawa ini. Kebetulan Dapil saya juga di wilayah selatan Jawa soalnya Bapak.

Yang berikutnya yang terkait dengan bantuan kapal, kita mendukung sekali ya dengan anggaran KKP yang memang sangat kecil untuk kerja-kerja yang sangat luar biasa besarnya ini. Nah, mohon kiranya nanti ini apabila disetujui bantuan-bantuan kapal itu juga bukan hanya untuk perairan sekali lagi yang laut Jawa dan yang sudah sangat mainstream tetapi juga nelayan-nelayan dan juga perikanan di sisi pesisir selatan Jawa. Itu yang perlu diperhatikan.

Nah, yang terakhir ini Bapak Menteri. Memang belum pernah dibicarakan, tetapi apakah ada kajian yang terkait dengan Omnibus Law ini yang kemungkinan bahwa kementerian Bapak juga akan mendapatkan resikonya apabila ini diterapkan. Kalau KLHK kita baru akan FGD besok Pak, di yang lain juga begitu. Nah, kita tidak tahu ini apakah sektor perikanan dan kelautan juga merasa ini bagian yang penting untuk mencoba membedah karena memang investasi yang di-*open* sedemikian rupa di sisi lain itu mungkin kabar bagus tetapi di sisi lain ketika infrastruktur kita juga masih memiliki beberapa kelemahan apakah kita tidak menghadirkan para perompak-perompak juga Pak, tetapi atas nama investor itu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Cukup?

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Iya.

KETUA RAPAT:

Mbah Tarom silakan.

F-PKB (H. MUHTAROM, S.Sos.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati Ketua dan Pimpinan Komisi IV DPR RI,
Bapak Menteri dan para Dirjen,
Bapak dan Ibu semua yang saya hormati.

Langsung saja Bapak, di waktu Rapat Dengar Pendapat awal-awal disampaikan bahwa di KKP ini ada kekosongan pejabat sejumlah 150 kurang lebih itu. Itu sampai kapan mau diisi karena kenapa ini saya angkat? Karena

saya khawatir ini sudah terlalu lama dan ini mumpung di awal tahun anggaran jangan sampai ini berimplikasi luas.

Kemudian juga terkait itu pula, harapan kita tentunya dengan Bapak Menteri yang alumni Komisi IV DPR RI ini kalau kemarin bisa mengkritisi tentunya saat ini harus lebih mempunyai peningkatan yang signifikan. Karena kalau melihat disini, ini angka-angka masih belum terlalu signifikan. Maka harapan saya dengan adanya 150 pejabat ini diisi tidak terulang lagi pada tahun 2016, 2017 terjadi disclaimer. Ini mudah-mudahan sudah WTP pada akhirnya WTP ini menyangkut kinerja Bapak Menteri yang notabene alumni Ketua Komisi IV DPR RI.

Berikutnya Bapak, terkait dengan selalu saya proporsional antara wilayah yang punya laut dan tidak punya laut ini program-programnya proporsional karena sementara ini kesadaran masyarakat sudah mulai bangkit dengan adanya banyak komoditi masyarakat tidak lepas tanaman pangan tetapi juga ada komoditi-komoditi yang lain yang bisa dihasilkan untuk masyarakat dalam rangka meningkatkan pendapatan keluarga kemudian juga kesadaran masyarakat kaitannya dengan urusan stunting dan lain sebagainya.

Terima kasih Bapak Menteri.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Bapak Muhtarom, saya hanya bantu menjelaskan sebagian sudah mulai diisi cuma inikan perlu waktu.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN (EDHY PRABOWO, M.M., M.B.A.):

Sudah Pak Ketua, mohon ijin.

Tanggal 20 Desember kita sudah melantik semua yang 151.

F-PKB (H. MUHTAROM, S.Sos.):

Alhamdulillah, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya Ibu Alien Mus yang banyak wilayahnya kelautan.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Terima kasih Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati Bapak Menteri, Bapak Sekjen beserta jajarannya.

Pak Menteri, ijin saya mau sampaikan kemarin tanggal 23 perairan Maluku Utara tidak tahu apa yang terjadi air laut tiba-tiba berubah menjadi agak coklat kehitam-hitaman. Dan ikan laut karan itu mati serentak dan terampung di atas permukaan. Baru kemarin tanggal 23 Februari 2020, saya kemarin dikabarkan dari masyarakat di perairan sana. Saya juga sudah minta air lautnya untuk bisa nanti dimasukkan ke lab ada dampaknya.

Ini yang saya sampaikan bahwa memang perlu pengawasan di perairan khususnya di perairan-peraian yang memang begitu luas Pak. PSDKP memang butuh disana untuk pengawasannya. Saya melihat kemarin waktu kita Rapat Dengar Pendapat dengan eselon I itu Pak, tidak ada kapal yang disana mengawasi hanya di peraian Maluku itupun di Teluk. Jadi ini sangat harus diperhatikan gitu.

Saya juga ingin menyampaikan soal nelayan-nelayan yang ada di perbatasan. Kemarin juga bersama dengan eselon I, saya sudah sampaikan ada program yang bergadget, tapi kan Bapak tahu sendiri harus membuat satu program itu sesuai dengan geografis dan letak wilayah masing-masing itu. Jangan disama ratakan program yang ada di Pulau Jawa dengan pulau-pulau yang timur Indonesia, tidak bisa. Pokoknya Pulau Jawa pasti dapat signal kan, tapi kita kalau mau dikatakan juga di dalam daerah-daerah kabupaten ibu kota pun kadang tidak dapat signal. Itu maksudnya, reportnya seperti apa.

Kemarin saya juga sudah menanyakan kepada Ibu ya, soal karantina. Kami juga punya penghasil ikan dan kita sudah ekspor Pak, dan itu *alhamdulillah* beliau menyampaikan kepada saya karantinanya sudah 13 titik, walaupun saya pun baru mengetahuinya ada beberapa titik. Jadi mudah-mudahan bisa, dan terima kasih banyak dan *insya allah* saya juga sangat menginginkan bahwa anggaran di Kementerian KKP ini bisa dinaikkan karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak di seluruh negeri Indonesia yang kita cintail

Terima kasih atas tatapannya Ketua ku.

*Wabillahi Taufiq Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Bukan Anggota Banggar mau ngomong naikkan anggaran.

Selanjutnya Bapak Abdullah Tuastikal.

F-NasDem (Ir. ABDULLAH TUASTIKAL, M.Si.):

Yang saya hormati Pimpinan, rekan-rekan Anggota Komisi IV DPR RI, Bapak Menteri beserta jajarannya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Banyak hal yang kita sudah sampaikan dan banyak hal yang kita sudah dengarkan dari Kementerian KKP. Untuk itu, kalau saya tidak lagi bicara soal Maluku, kalau bicara soal Maluku ini episode berikutnya, karena anggarannya cuma Rp6 triliun. Kalau mau bicara soal Maluku itu bicara soal Rp11 triliun atau Rp15 triliun baru bisa perencanaan soal Maluku. Untuk itu Bapak Menteri, saya kira banyak hal yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman, bahwa dalam rangka kegiatan-kegiatan yang terkait dengan bantuan-bantuan itu kalau dapat disesuaikan dengan kearifan lokal. Selama ini ada kegiatan tapi tetap saja berjalan, untuk itu saya usulkan agar pengawasan harus semakin banyak. Pengawasan itu bisa menggambarkan perencanaan, dan pengawasan bisa menggambarkan bahwa kegiatan itu cocok atau tidak. Untuk itu, saya berharap agar perlu ada pengawasan. Banyak hal yang memang kita dapat dilapangan tapi kita juga tidak bisa dapat berbuat apa-apa karena kita baru ada di DPR RI dan Bapak Menteri dulu dari Ketua Komisi IV DPR RI, tapi saya yakin bahwa kegiatan teknis di lapangan kita hampir sama. Untuk itu, saya kira ini yang sangat cukup penting.

Lalu yang kedua Bapak Menteri, saya kira bicara soal garam ini usulan saja, bahwa kebutuhan nasional dan potensi garam yang dihasilkan oleh masyarakat itu sekitar 2,7 juta ton dan yang bisa digunakan cuma 30% karena tidak memenuhi NaCl, natrium clorida. Ini yang harus menjadi perhatian karena kalau tidak target nasional kurang lebih 3 juta ton dan kalau cuma sekitar 30% itu tetap saja harus ada impor. Untuk itu, harus ada jalan keluar bagaimana peningkatan industry agar kualitas garam nasional ini, itu bisa sebanyak-banyaknya bahkan semua bisa digunakan untuk kepentingan industry. Itu Pak, dari saya.

Juga mungkin yang keempat Bapak Menteri, saya kira kegiatan-kegiatan terhadap Bansos dan Dapil ini saya kira regulasi dan aturan harus jelas. Kami dari Dapil Maluku saya hanya mengharapkan agar kegiatan-kegiatan bisa menyentuh masyarakat Dapil kita, karena semakin banyak aturannya mungkin tidak jelas, itu maka kedepan itu juga bisa menyusahkan kita sendiri. Saya kira ini yang saya bisa sampaikan, mungkin yang terakhir Pak Menteri, saya kira kedepan ini banyak teman-teman kita ada di Anggota Banggar kita pasti memiliki komitmen untuk meningkatkan apa yang menjadi perencanaan Kementerian Kelautan untuk tahun 2021.

Demikian, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Abdullah Tuastikal.

Yang terakhir Ibu Nur'aeni jangan bicara Dapil, kita bicara nasional.

Terima kasih.

F-PD (Hj. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.):

Baik, terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan Komisi beserta Anggota, Bapak Menteri dan jajarannya.

Langsung saja Bapak Menteri, mungkin saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, strategi dan konsepsi seperti apa yang akan dilakukan oleh Kementerian KKP untuk bisa mengelola wilayah laut pesisir dan pulau-pulau kecil. Karena kita tahu saat ini kaitan dengan perencanaan ruang laut inikan belum dibuat serta belum diatur secara yang tepat.

Dan berikutnya saya melihat masih banyak reklamasi pantai yang dilakukan oleh korporasi. Ini tentu ada peranan dari Kementerian KKP juga untuk bisa melakukan sinergi, kordinasi dengan Kementerian terkait lainnya. Tadi yang disampaikan oleh Ketua Poksi saya, saya juga menambahkan terhadap capaian dan tareget indikator kinerja utama KKP. Di sini saya lihat bahwa nilai tukar nelayan sepertinya Kementerian KKP masih ragu-ragu untuk meningkatkan target di tahun 2020 yang awalnya 113 kenapa di tahun 2020 target nilai tukar nelayan ini menjadi turun 102. Ini ingin saya dalam ya seperti apa, kalau data yang kami dapatkan seperti itu.

Dan ketiga, saya juga menyampaikan aspirasi seperti dari penyuluh perikanan agar untuk bisa diperjuangkan dari Bapak Menteri agar bisa diperhatikan untuk menjadi ASN.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Yang terakhir lagi tadi saya sudah katakan terakhir, ini lebih terakhir lagi.

Silakan Bapak Sumail.

F-GERINDRA (Ir. SUMAIL ABDULLAH):

Baik, terima kasih.

Pimpinan dan Anggota yang saya hormati,
Bapak Menteri dan segenap jajarannya.

Sebenarnya tadi dari Ibu Nur'aeni itu terakhir, tapi saya mendapatkan surat cinta Pak. Mohon maaf, ini barangkali dari Dapil. Pertama, yang ingin

saya sampaikan bahwa saya mengapresiasi terhadap kementerian Kelautan dimana 5 point strategis kebijakannya adalah memperbaiki komunikasi dengan nelayan. Point keduanya adalah ini kalau saya lihat disini pengelolaan wilayah laut pesisir dan pulau-pulau kecil. Hari ini di Banyuwangi sedang ada polemik yang luar biasa dan ini menjadi hampir setiap Senin Pemda itu didemo Pak, kaitannya dengan rencana penyewaan Pemda terhadap Pulau Tabuan yang luasnya kurang dari kalau kita kelilingi kurang dari 2000 KM. Yang masyarakat inginkan adalah karena selama ini pulau tersebut menjadi pengolahan masyarakat dimana wisatanya berbasis pelibatan daripada seluruh kelompok-kelompok sadara wisata yang disekitarnya, mereka menginginkan bahwa ini tidak disewakan kepada investor dari luar. Karena disana yang dibutuhkan bukan investasi menurut mereka dan juga menurut hemat kita, tetapi adalah konservasi. Mohon ini menjadi perhatian Bapak Menteri untuk kemudian kita bisa hadir kesana melihat persoalan yang terjadi disana, sehingga masyarakat merasa bahwa keluhan kebutuhannya didengarkan oleh kita semuanya.

Yang berikutnya Bapak Menteri, kami habis dari Kunker kesana juga tapi saya kira ini juga terjadi di wilayah belahan Indonesia. Perlu ada optimasi terhadap pasar-pasar perikanan yang ada. Kita ingin pasar-pasar perikanan yang ada itu higienis sehingga kalau misalnya kita datang kesana bukan hanya belanja akan tetapi sambil berekreasi.

Kira-kira itu, demikian yang bisa disampaikan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Sumail.

Demikian pertanyaan dan tanggapan yang disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPR RI. Selanjutnya kami persilakan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menyampaikan jawabannya. Sebelum itu sebelah kiri saya Pimpinan yang dulu sama Bapak Menteri duduk di depan akan menyampaikan usulan atau pertanyaan.

Silakan Bapak Daniel Johan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PKB (DANIEL JOHAN, S.E.):

Terima kasih.

Pimpinan, sahabat Komisi IV DPR RI, Bapak Menteri dan seluruh jajaran.

Bapak Menteri, dari seluruhnya saya juga ingin mewakili seluruh teman-teman. Ada hal yang penting sebenarnya dan ini menjadi kesulitan Bapak Menteri juga selama 5 tahun kemarin. Dari seluruh Kementerian mitranya Komisi IV DPR RI yang paling menyusahkan itu KKP. Dalam

pengertian penerima bantuan nelayan kita itu sangat sulit Pak, karena diwajibkan memiliki badan hukum. Itu juga ingat banget Bapak Menteri termasuk yang protes. Dan itu juga membuat penyerapan anggaran program KKP menjadi sulit tidak terserap. Jadi saya minta Kementerian KKP bisa seperti Kementerian Pertanian. Mencabut Peraturan Menteri yang mempersulit dan bisa mengeluarkan Peraturan Menteri yang persis sama dengan Kementerian Pertanian dalam rangka mendukung para nelayan kita tidak kesulitan menerima program-program kerakyatan dari KKP.

Mungkin itu saja terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Tapi mungkin beda Bapak Daniel, kalau Pimpinan sana Anggota mungkin Pimpinan tidak pakai persyaratan bisa, kalau Anggota dulu tidak bisa. Maka kita ingin mendengar langsung jawaban dari Mantan Ketua Komisi IV DPR RI apa dan bagaimana.

Silakan Bapak Menteri.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN (EDHY PRABOWO, M.M., M.B.A.):

Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian.

Bapak Ketua dan Wakil Ketua, para Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati.

Ibu Endang terima kasih atas usulannya nanti kami akan pelajari, secara prinsip tidak ada masalah kalau itu untuk penguatan. Bapak Yohanis tentang pola perbaikan dengan nelayan, komunikasi adalah kita membangun seluas-luasnya, nelayan itu mulai dari perorangan, oh mohon maaf Bapak Johan saya perbaiki. Komunikasi dengan nelayan itu tidak hanya satu nelayan tetapi korporasi, kelompok, koperasi, maupun kepala dinas itu bagian daripada nelayan. Dulu kami merasakan selama disini kepala dinas itu merasa tidak dilibatkan mutlak. Sehingga beberapa wilayah kita temukan ada bantuan yang saling lempar antara kepala dinas yang satu, kabupaten maupun provinsi. Nah, ini kita sudah melakukan Rapat Kerja Nasional dengan seluruh kepala dinas. Tidak hanya itu kita membuka ruang seluas-luasnya kepada mereka untuk melakukan usulan-usulan, sehingga kami harapkan mereka ini menjadi pengontrol kita dilapangan. Tentang BBM sebagai misalnya, ini kita juga sedang mendata secara total komunikasi dengan Menteri ESDM sangat terbuka. Ini nanti Ditjen Tangkap begitu sudah waktunya terima data masukan dari seluruh kepala dinas kami akan langsung dengan Menteri ESDM.

Tentang harga garam memang ini kami komunikasi dengan Menko Ekonomi dan Menteri Perindustrian sudah sangat terbuka ruang untuk

berkomunikasi. Perdebatannya itu di jenis garam industry dan garam non industry. Kalau kita terus terang industry maupun non industry itu sebenarnya sama, sama-sama garam asin, tapi ternyata ada spesifikasi yang diminta. Kalau garam industry yang dibutuhkan itu 97 NACL-nya minimal. Nah, langkah-langkah yang kami lakukan untuk meningkatkan NACL ini adalah kita membangun bio membrane. Dengan bio membrane ini memang baru 7000 hektar dari total 27 ribu hektar lahan garam kita yang ada, yang baru kita membranisasi. Tapi kita tahun 2020 ini juga terus mencicil untuk mengarah kesana. Manfaatnya sangat besar dalam melakukan bio membrane ini, yang pertama NACL-nya bisa terangkat. Yang kedua, produktifitas garam per hektarnya itu meningkat lebih dari 35% Pak Johan. Jadi ini salah satu yang akan kita dorong.

Kita juga terus berkomunikasi untuk mendesain bagaimana garam nelayan ini bisa punya nilai tambah. Nilai tambahnya dimulai dari, satu mengurangi ongkos angkut. Nah, untuk ongkos angkut ini kami sedang mendata berapa jumlah potensi untuk dibuatkan jalan kearah tambah garam itu sendiri. Dan ini kami hanya bisa dapat data kalau kita minta kepala dinas yang lebih tahu wilayah. Menteri PU sudah siap untuk membangun hanya mereka minta daerah mana yang akan mereka bangunkan jalan. Mungkin jalannya tidak harus dua mobil, yang penting satu mobil bisa lewat, itu cukup. Karena ongkos angkat garam ini satu karungnya Rp12.000,- sendiri kebayang tidak kalau hatga garam petani yang cuma Rp500,- satu karung ngangkatnya Rp12.000,- sudah habis diongkos angkut. Jadi ini yang sedang kita data terus. Masalah daya saing terus akan kita perbaiki. Pak Ketua, kami sedang membangun menjajaki komunikasi dengan Eropa, dimana ongkos tariff biaya pengalengan, ongkos produk olahan kaleng ikan kita di Eropa itu masih kena 20,5% tarifnya. Impor duty ke Amerika juga ini sedang kita jajaki, 2 langkah yang kita lakukan yang pertama kita menggandeng negara tetangga kita yang sementara ini sudah dapat impornol seperti Timor Leste, Malaysia dan Philipina. Kalau ini bisa sementara kita gunakan dulu sambil perbaiki kita lakukan pelan-pelan. Ke depannya kita akan membuka komunikasi melalui negara Yunani, karena disana jaraknya juga sangat dekat. Kedua, ada kemudahan untuk masuk Yunani, kebetulan seluruh pengusaha Yunani itu sudah cukup tersebar di Eropa tinggal sekarang melobby ke Uni Eropa yang sedang kita lakukan. Ini butuh waktu tentunya tidak sendirian dengan Kementerian Luar Negeri kita juga berkomunikasi.

KETUA RAPAT:

Pak Menteri, ini saya potong sedikit.
Bapak Dedi mau menindaklanjuti ini yang baru dikatakan tadi.

Silakan Bapak Dedi.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PG (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Pak Menteri, yang menjadi problem kita itukan membangun tradisi culture kelautan. Problem kita ini ada keterpisahan antara pendidikan, sekolah formal itu dengan aspek lingkungan. Nah, barangkali mumpung ini Menteri

Pendidikan lagi sedang pendidikan merdeka belajar, apa tidak segera cepat ditindaklanjuti agar sekolah-sekolah yang dipinggir laut kurikulumnya cuma satu, kelautan saja ilmunya. Termasuk kimianya, kimia kelautan kayak garam itu kan faktor ketidak pengetahuan masyarakat terhadap kimia kelautan yang diajarin di sekolah saya SMA kelas dua saya diajarin itu. Nah, bagaimana itu didorong agar penelitian biologis sekolah itu meningkatkan produktifitas kearah menjadi kebutuhan pasar.

Terima kasih.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN (EDHY PRABOWO, M.M., M.B.A.):

Baik, terima kasih Bapak Dedi.

Saya mendengar juga masukan Bapak pada saat pertama kali saya sidang Rapat Kerja disini dan itu menjadi catatan kami. Makanya langkah kami ke depan kalau urusan pendidikan secara nasional adalah wewenang Kementerian Pendidikan itu sudah kami sampaikan kepada beliau dalam setiap kesempatan. Tetapi intinya kita di internal KKP kita membangun konsep pendidikan vokasi di sekolah-sekolah tinggi kita di Politehnik dan SMK kita. dan SMK ini juga kedepan kita akan tingkatkan menjadi Politehnik karena untuk SMA sederajat itu akan diambil oleh provinsi berdasarkan Undang-Undang Pendidikan yang baru. Sehingga materi tentang pendidikan kelautan itu sebenarnya sudah kita masukkan melalui program di internal kita. Tapi nanti kalau untuk lebih secara nasional kami akan memberikan masukan kepada Menteri Pendidikan secara....

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PG (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Sebagai contoh saja titik fokus misalnya untuk mengacu di Madura. Kalau anak bisa memproduksi garam, Madura dia ya, ini mau memperjuangkan kepentingan masyarakat Madura baru datang sekarang bagaimana kamu ini. Misalnya untuk di Madura, kalau kandungan yang sesuai dengan harapan masih kurang itu menjadi kompetisi di sekolah. Siswa dan guru yang mampu memproduksi garam sesuai dengan standarisasi industry itu biologinya 9 atau IPA-nya 9. Dan itu saya buat juga di tempat saya itu dibidang pertanian yang berhasil nanam padi dengan kualitas tertentu itu nilai angkanya langsung 9 di raportnya.

Terima kasih.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN (EDHY PRABOWO, M.M., M.B.A.):

Pak Azikin Solthan terima kasih atas masukan tentang kapal bantuan, memang ini menjadi evaluasi bagi kami. Itu tadi komunikasi dengan kepala dinas yang mungkin belum didahulukan sehingga kadang-kadang kita mengambil kesimpulan sendiri tentang bantuan yang akan kita turunkan.

Mungkin tidak hanya kapal tetapi hal yang lain kita harapkan ini bisa segera kita pecahkan masalah-masalah komunikasinya.

Pak Ichsan Firdaus, masalah kapal sitaan secara prinsip pada 2 minggu pertama saya jadi Menteri KKP sudah berkomunikasi atas saran Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Bapak Luhut, sudah diundang rapat bersama dengan Jaksa Agung dan Menteri Keuangan. Secara prinsip hasil barang kapal sitaan itu yang inkrah itu ada 72 kapal, sudah terdata itu sekarang menjadi aset negara di bawah komandonya Menteri Keuangan. Saya prinsip juga Menteri Keuangan sudah siap bersedia untuk menyerahkan, ada dua alasan kendala keuangan secara hukum kalau mau menyerahkan kepada pihak ketiga di luar Pemerintah itu ada prosesnya tergantung nanti apakah hibah ataupun harus ada jual beli. Kalau jual beli aturannya juga harus dihitung, kalau anggarannya lebih mahal dari 100 miliar, ongkos kapalnya itu harus ijin DPR RI, kalau di bawah itu ijin Presiden, di bawah 10 miliar baru langsung Menteri. Ini semuanya tapi lebih mudah kalau itu diserahkan langsung kepada badan-badan Pemerintah sebagai misal perguruan tinggi, sebagai misalnya nanti BUMN, sebagai misal yang berhubungan dengan Pemerintahan. Ini sedang kita kelola. Namun demikian, tidak ada tertutup kemungkinan kalau pun kelompok nelayan ataupun koperasi itu akan dibagikan. Ini sedang kita cari polanya, secepatnya kita akan lakukan.

Yang kedua, masalah Dana Alokasi Khusus banyak masukan juga walaupun Bapak Ketua tidak terlalu setuju, kami akan memprioritaskan daerah-daerah yang sebenarnya anggarannya memang sangat minim. Kalau Kepri agak sedikit berbeda, ini hanya mungkin pendekatan saja Pak Ketua.

Yang kedua, Satgas 115 kami jamin *insya allah* tidak ada tumpang tindih karena pengelolaan anggarannya juga tidak mudah untuk keluar kalau itu ada hubungannya. Karena misalnya Angkatan Laut, Bakamla sudah punya anggaran tapi ini yang kita keluarkan adalah di luar semua keperluan yang dikeluarkan KKP maupun dikeluarkan oleh mitra-mitra lainnya.

Masalah regulasi tentang pelarangan cantrang tadi sudah saya sampaikan saat pembuka. Kami sudah melakukan finalisasi terhadap peraturan-peraturan dan *insya Allah* peraturan ini sudah final tinggal kami laporkan kepada Presiden setelah itu setelah jadi Peraturan Menteri (PERMEN) akan kami sampaikan kepada DPR RI. Namun demikian, kami juga terbuka untuk apabila ada perbaikan-perbaikan kedepannya.

Pak Salim Fakhry, terima kasih atas proposalnya kami akan pelajari kalau tidak salah tadi budidaya perikanan di daerah pengunungan tinggal kita lihat apa yang bisa kita segera lakukan disana. Bapak Sutrisno, terima kasih atas dukungan peningkatan anggarannya kemudian harga garam rakyat memang ini menjadi polemik yang cukup berkepanjangan. Kami dan Menteri Menko Perekonomian dan Menteri Perindustrian juga berkordinasi terus bagaimana ini bisa terserap. Kalau tahun lalu penyerapannya garam rakyat itu 1,1 juta diwajibkan setiap ijin yang diberikan untuk impor garam untuk kebutuhan industry yang tidak bisa diproduksi oleh industry dalam negeri,

mereka wajib menyerap garam rakyat. Kalau dulu 1,1 sekarang sudah 1,5 juta. Kemudian Patimban ini nanti akan segera kami tindaklanjuti

Pak Suhardi Duka, tentang data ini kami dari BPS Pak, dan kami sendiri juga mengkoleksi data tidak usah ragu kita bisa dicek juga Pak. Hanya mungkin dalam penilaian saya kecepatannya saja yang kita perlu perbaiki nanti di data. Terima kasih juga atas dukungannya. Kalau masalah ekspor memang sudah menjadi tugas kami untuk mendorong ini. Pak Suhardi, kita melakukan komunikasi terus dengan Bea Cukai saling mempermudah dalam melakukan ekspor, tapi kita untuk impor kita persulit. Kalau bisa pintu-pintu ekspor kita perbanyak, sementara pintu impor kita batasi hanya 6 pintu saja.

Kemudian Pak Andi Akmal, terima kasih atas dukungannya. Terima kasih juga atas masukannya tentang Humas dan subsidi pupuk. Subsidi pupuk sudah kami bersurat kepada Menteri Pertanian dan dapat respon yang cukup baik, tinggal mungkin mohon dukungan juga melalui Komisi IV DPR RI.

Pak Haerudin, masalah TPI juga menjadi catatan dari kami, total semua TPI pelabuhan perikanan itu ada 538 yang sekarang sedang beroperasi, tapi sisanya itu juga masih banyak yang mangkrak, yang ini sekarang menjadi PR kami untuk segera kita selesaikan. Karena mau tidak mau kita harus selesaikan sudah ada anggaran negara yang keluar nyemplung disitu. Kalau kita mundur kita berarti termasuk yang merugi, sementara kalau kita lakukan, kita mungkin menambah anggaran yang mungkin tidak lebih besar daripada kalau kita membuat baru. Ini yang sekarang kita sedang nilai.

Ibu Ema, masalah badan hukum kita sudah inikan ternyata bukan peraturan Undang-Undang ini cukup Peraturan Menteri dan ini nanti kami akan ambil yang paling sederhana mungkin untuk segera, tidak ada masalah. Ini mungkin cukup Per Dirjen atau Permen juga tidak ada masalah, yang penting intinya satu kita pastikan bantuan itu sampai kelompok nelayan. Yang kita harapkan arahan Bapak Presiden itu di bawah perputaran ekonominya segera ada, sehingga anggaran kami besok itu untuk yang urusan-urusan padat karya saya minta Bapak Irjen untuk segera menyikapinya dengan aturan-aturan keuangan supaya juga layak secara hukum sesuai dengan ketentuan keuangan kami minta, saya minta, saya perintahkan semua eselon I untuk yang namanya bantuan yang padat karya ini segera cair. Karena kami kalau tidak akan diberi teguran sama Bapak Presiden melalui Kementerian Keuangan secara tertulis Pak Ketua.

Kemudian Mbak Luluk, riset kami terima kasih atas masukannya. Tentang Omnibus Law tidak ada masalah dengan peraturan yang ada di KKP, malah kita ikut mendukung sejauh ini belum ada hambatan-hambatan, malah kami mau diperingan, dipermudah, tanpa itupun kami sudah siap untuk dipermudah. Jadi yang paling penting satu, kontrol dan kebenaran terus nilai tambah yang diciptakan itu ada.

Kemudian dukungan masalah ZEE, menjadi PR yang besar dengan isu Natuna saya pikir ini kita dibukakan mata kita bahwa sebenarnya Natuna itu hanya sebagian kecil dari ZEE yang sebenarnya kosong di Indonesia. Kalau di Natuna ada pencurian saya yakin di tempat juga banyak. Makanya ini PR kita adalah menambah bagaimana zona ekonomi eksklusif kita ini diisi oleh kapal-kapal penangkap ikan. Saya minta Pak Fikar sudah melakukan penelitian, penelaahan banyak termasuk ukuran-ukuran kapal juga Pak Sudin Bapak Ketua. Ini akan kita terus perbanyak di zona ekonomi eksklusif.

Kita punya potensi di kapal dulu punya hak nangkap di perairan internasional sampai 500-600 kapal yang sampai sekarang belum kita keluarkan ijin kapal. Ke depan kami akan melobby internasional, ini hanya dimiliki oleh negara kita, negara lain manakala mau mengambil ijin menangkap di internasional itu tidak diijinkan. Indonesia masih punya peluang 500-600 kapal. Nanti pada waktunya kami akan membentuk tim untuk melakukan lobby di internasional di pihak-pihak internasional yang memberikan ijin terhadap penangkapan ikan, sampai Alaska kita boleh nangkap ikan. Jadi Bapak Ketua, ini peluang untuk devisa negara dan pendapatan negara yang lebih besar kedepan.

Bantuan-bantuan kapal saya pikir sama, tinggal nanti mohon masukan-masukan. Tentunya kami membuka komunikasi dengan Kepala Dinas, komunikasi kami juga kami sampaikan untuk urusan dengan Komisi IV DPR RI harus satu suara. Jangan sampai nanti kita memberikan bantuan ke Komisi IV DPR RI karena kan dulu pernah kejadian dari Komisi IV DPR RI turun tahu-tahu kepala dinas sering menghambat. Dan kita harapkan kedepan sudah tidak ada lagi hal ini.

Selanjutnya Pak Muhtarom, pejabat yang kosong *alhamdulillah* kita sudah prioritas itu Pak, itu tanggal 20 Desember sudah kita isi semua, bahkan sekaligus yang pensiun-pensiun pada saat tanggal 20 itu sudah kita masukkan totalnya tidak 151, totalnya 188 waktu itu. Jadi *alhamdulillah* sudah terisi semua, dan mudah-mudahan karena saya hanya melanjutkan dari apa yang sudah diputuskan oleh Baperzakat saya harapkan kualifikasinya juga sudah sesuai. Tapi kami juga tetap akan mengawasi pelaksanaannya setelah diangkat.

Masalah komoditas selain laut, tentang kalau tidak punya laut yang punya Dapilnya bukan laut saya pikir banyak jalan keluar Pak, kami sudah menemukan konsep berbudidaya kepiting tanpa kolam, melalui mini-mini apartemen yang sebenarnya sudah ditemukan oleh anak-anak didik kita di riset-riset di Balai Jepara, itu kalau di daerah pegunungan di daerah yang tidak ada laut itu bisa berbudidaya kepiting tanpa menggunakan kerambah jaring apung atau menggunakan kolam, cukup dengan kepiting mini apartemen, apartemen kepiting. Jadi satu KK itu bisa kita desain 1000 ruangan apartemen yang kecil-kecil, seperti ini kira-kira tetapi ada pintunya agak besar lagi ada pintunya. Lebih besar dari jangkrik dan ini bisa dengan dua varietas, kepiting untuk yang besar ataupun kepiting untuk lunak. Potensi pasarnya sangat besar, ini akan kami minta perbanyak dengan budidaya segera saja nanti dihitung dan Pak Sudin kalau dengan ini jadi kalau Bapak

nelayannya kelaut atau bapaknya ke sawah, Ibunya bisa ngasih makan kepiting ini. Dalam hitungan kita 400 rumah kepiting ini kalau diisi dengan kepiting pendapatannya sebulan akan bertambah sekitar 1,7 juta artinya kan ada pertambahan pertumbuhan. Kalau ini kita perbanyak saya pikir tergantung kerajinan kita masing-masing. Ini baru penelitian awal dan kita akan segera untuk deploy kepada masyarakat.

Kemudian jadi Bapak Muhtarom jangan khawatir, selain mungkin yang tadi itu usulan kami, Bapak juga bisa mengusulkan bioflok atau yang lain di daerah-daerah yang Bapak butuhkan. Tidak hanya itu mungkin Bapak bisa juga memberikan kesempatan kepada masyarakat yang ingin mengelola produk perikanan misalnya bikin macam-macam kita juga ada alatnya Pak. Nanti mohon ijin kalau ada usulan-usulan itu akan segera disampaikan.

Ibu Alien Mus, terima kasih masukan dan infomasinya kami segera tindaklanjuti. Terima kasih juga atas dukungannya, yang lain-lain Maluku Utara merupakan sentra perikanan yang saya pikir juga sangat strategis di Indonesia itu masuk kawasan daerah tangkap yang ikannya cukup banyak, kita akan kedepan akan banyak yang kita dorong kesana. SKPT Morotai itu salah satu contoh, karena Maluku dan Papua juga menjadi strategi. Ke depan kita akan mengarah kesana Pak, karena kalau kemarin isu tentang Natuna potensi ikan kita itu hanya ada 700 ton setahun. Tapi di Maluku, Maluku Utara dan Papua itu ada 6 juta ton total semua kalau itu bersamaan, jadi begitu besar. Jadi total hampir 6 juta ton ikan. Jadi saya pikir ini potensi yang sangat besar dalam rangka untuk menambah devisa negara.

Pak Abdullah Tuasikal, terima kasih atas usulannya tadi sudah kami jawab tentang garam dan bantuan-bantuan, regulasi. Dan terima kasih juga atas dukungan anggarannya. Kemudian Ibu Nur'aeni masalah ruang laut dan pulau-pulau kecil secara prinsip kita mengikuti aturan ada zonasi dan sudah kita lakukan, tidak sulit juga tapi mekanismenya yang harus diikuti. Kalau ada usulan di daerah Ibu atau kepala daerah itu dari kepala daerah nanti sampai ke provinsi zonasi itu sekarang begitu ada usulan dari masyarakat atau dari daerah kita juga tidak akan mempersulit yang penting untuk keperluan daerah jelas dan keperluannya jelas.

Terus masalah NTN memang ini ada sedikit modifikasi dari Bappenas, makanya kita mengikuti Bappenas, mohon maaf BPS. Jadi angkanya harus diturunkan, ya kita mengikuti saja. Yang jelas semangat kita adalah bagaimana nilai tukar nelayan baik di budidaya maupun nelayan tangkap itu lebih dari yang lain. *alhamdulillah* dalam kondisi ekonomi sekarang yang sedang turun di sektor nelayan dan pembudidaya kita masih bertahan dan cukup istilahnya nilai keekonomiannya masih cukup tinggi. Ini berdasarkan BPS Ibu.

Kemudian Bapak Sumail, tidak ada orang yang bisa menyewakan pulau tanpa seijin KKP, jadi mungkin kalau ada dia bisa kita anggap, bisa kita batalkan. Tinggal kita lihat nanti apakah seperti apa ceritanya mohon nanti minta Dirjen yang akan tindaklanjuti. Kemudian masalah optimalisasi pasar-pasar, terima kasih juga atas masukannya, tinggal usulannya di daerah mana.

Memang kedepan kita akan membangun kawasan pasar ikan yang bersih dan bisa higienis itu menjadi target kita untuk meningkatkan daya saing kita. Pak Daniel Johan masalah badan hukum saya pikir kita sama, dulu ini merupakan PR 5 pimpinan di atas. Kalau Ketua sekarang agak beda Pak, sesuai amal perbuatan. Pak Dedi Mulyadi, terima kasih atas masukannya.

Ketua, Wakil Ketua, Bapak dan Ibu Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati.

Demikian penjelasan dari saya, terima kasih atas masukannya. Pak Herman apa kabar Pak? Pak Hermanto sudah tidak boleh ngomong Pak, sudah selesai Pak.

KETUA RAPAT:

Cukup Pak, Pak Menteri cukup? Kirain masih ada.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Ketua, Hermanto Bapak Ketua.

KETUA RAPAT:

2 menit, bolehlah kan hak Anggota punya hak semuanya.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Ini saya sudah hari ini dengan Bapak Ketua kita....

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN (EDHY PRABOWO, M.M., M.B.A.):

Pak ijin, Pak Ketua mohon ijin memberikan usulan kalau boleh Bapak Ketua, boleh tidak Pak Ketua.

Hari inikan kebetulan ada Ratas, kalau Ratas kita sudah lewat dan sedang berlangsung saya sudah ijin bisa bertahan disini. Tapi ada langkah kedua yang mungkin mohon kebijakan Bapak Ketua, disini ada kebijakan TPA untuk eselon I yang sekarang sudah dilelang. Kalau TPA hari ini saya tidak hadir kita nunggu 2 bulan lagi baru ada TPA berikutnya Pak Ketua. Jadi TPA-nya itu jam 14.00 WIB.

KETUA RAPAT:

Jadi gini, kalau dari sini ke istana itukan hanya 15 menit, karena Bapak kan pakai pengawalan. Bapak Hermanto masih mau tanya atau kita buat kesimpulan. Satu menit ya.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Nanti kurang. WA saja yang benar ini, nanti temuan lagi WA. Saya hanya memberikan dukungan saja untuk tambahan anggaran. Dua kali rapat dengan Dirjen selalu saya katakan bahwa inikan KKP kurang, jadi saya mendukung itulah tambahan. Terutama saya ingin supaya menjaga kawasan perbatasan di daerah-daerah Laut Cina Selatan Pak Menteri, kemarin sudah saya sampaikan.

Demikian saja Bapak Ketua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Kalau masalah itu cukup ngomong sama saya saja.

Terima kasih kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang telah menyampaikan jawabannya.

Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Dari dialog, diskusi, saran dan masukan Anggota Komisi IV DPR RI sebelum acara ini kami akhiri, kami bacakan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat, Rapat Kerja pada hari ini. Saya tidak mau lain kali salah tulis ya, saya ingatkan sekali lagi, ini bukan Rapat Dengar Pendapat tapi Rapat Kerja. Kesimpulan/keputusan

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan dan menyetujui perubahan alokasi anggaran atau realokasi sesuai dengan usulan eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020 sebagai berikut:
 - a. Sekretaris Jenderal Rp515.623.761.000,00 menjadi Rp510.323.761.000,00.
 - b. Inspektorat Jenderal menjadi Rp85.267.955.000,00.
 - c. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Rp702.462.450.000,00 menjadi Rp657.462.450.000,00.
 - d. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sebesar Rp739.572.614.000,00 menjadi Rp1.039.572.614.000,00.
 - e. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1.062.575.107.000,00 menjadi Rp1.005.875.000.107,00
 - f. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan sebesar Rp366.017.000.696,00 menjadi Rp321.017.000.696,00
 - g. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut sebesar Rp507.850.000.023,00 menjadi Rp469.850.023.000,00
 - h. Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1.868.216.557.000,00 menjadi Rp1.773.216.557.000,00 dan

- i. Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Hasil Perikanan sebesar Rp601.075.586.000,00 menjadi Rp586.075.586.000,00

Apakah disetujui Anggota?

Pemerintah?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN (EDHY PRABOWO, M.M., M.B.A.):

Setuju Pak.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

2. Komisi IV DPR RI mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan alokasi anggaran pada tahun 2021 dalam rangka mensejahterakan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Anggota setuju?

Bapak Menteri?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN (EDHY PRABOWO, M.M., M.B.A.):

Setuju.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk segera menyelesaikan segala kebijakan Peraturan Menteri yang masih berpolemik dalam rangka menghadirkan program dan kegiatan prioritas unggulan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, optimal dan inklusif.

Anggota?

Pemerintah?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN (EDHY PRABOWO, M.M., M.B.A.):

Terima kasih, setuju Pak.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk dapat merevisi Peraturan Menteri atau Petunjuk Teknis, Petunjuk Pelaksanaan agar kelompok nelayan dan kelompok pembudidaya ikan menerima bantuan tidak diwajibkan berbadan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM tapi cukup terdaftar teregistrasi sebagai kelompok nelayan dari dinas terkait atau ditambahkan koperasi.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Begini Pak Ketua, kelompok ini mestinya teridentifikasi secara jelas. Jadi memang harusnya dinas yang lebih, kita ingin efektif dan efisien ini. Soalnya kelompok-kelompok nelayan ini tidak ada yang jauh dari lokasi dinas, jadi cukup di dinas saja menurut saya, terdaftar yang penting, terdaftar dan teridentifikasi dan by name, by identitasnya itu harus jelas.

KETUA RAPAT:

Anggota lain silakan, ada tanggapan?

Singkat, jelas.

Menteri KKP?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN (EDHY PRABOWO, M.M., M.B.A.):

Pak, mohon ijin usulan Pak.

Sebenarnya dengan dinas terkait cukup, tapi kita tidak menolak juga yang sudah berbadan koperasi, yang sudah berbadan hukum. Artinya, inikan yang paling ringannya ini.

KETUA RAPAT:

Oke, yang paling kita anggap yang nomor 4 dinas terkait. Jadi kalau ada badan hukum koperasi itu lebih bagus.

Anggota?

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Perlu ditambahkan kabupaten barangkali.

KETUA RAPAT:

Tidak perlu, Pemerintah?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN (EDHY PRABOWO, M.M., M.B.A.):

Setuju Pak, terima kasih.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

Dinas terkait itu bisa kabupaten, bisa provinsi.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Pimpinan, barangkali ada pembicaraan yang kita tadi terlewat.

KETUA RAPAT:

Apa itu?

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Masalah kita mendukung KKP mengajukan pertambahan anggaran.

KETUA RAPAT:

Demikian rancangan kesimpulan rapat.

Terima kasih.

Sebelum menutup Rapat Kerja ini kami minta Menteri Kelautan dan Perikanan menyampaikan kata penutup Rapat Kerja hari ini.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN (EDHY PRABOWO, M.M., M.B.A.):

Terima kasih.

Bapak Ketua, Wakil Ketua, serta Bapak dan Ibu Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati.

Saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan dorongan semangat kepada kami Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kami berharap komunikasi antara Komisi IV DPR RI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan terus kami ingin tingkatkan. Semoga semangat kita dalam Rapat Kerja hari ini semakin memudahkan para nelayan kita, pembudidaya kita, petambah garam kita dalam rangka membangun sentra kelautan dan perikanan di Indonesia.

Sekali lagi Bapak Ketua, terima kasih atas dukungannya. Saya akhir.

Wabillahi Taufiq Walhidayah,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Dengan demikian berakhir sudah Rapat Kerja pada hari ini. Atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI, mohon maaf apabila selama kami memimpin rapat ini ada kekurangan, kekhilafan. Dengan mengucapkan *alhamdulillahirabil'amin*, Rapat Kerja hari ini kami tutup.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.45 WIB)

a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat,

Ttd.

Drs. Budi Kuntaryo
196301221991031001